

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Perkembangan pelaksanaan otonomi daerah yang sudah diselenggarakan lebih dari satu dasawarsa di Indonesia semakin pesat. Lahirnya otonomi daerah di Indonesia bersamaan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Kekuasaan Pusat dan Daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah mengakibatkan perubahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang memberikan pengaruh bagi kehidupan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mendefinisikan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas otonomi daerah, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintah negara. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih menggali potensi daerahnya masing-masing sehingga pemerintah daerah mampu mengelola keuangannya dengan baik.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggaraan

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Pemerintah daerah mengelola anggaran pemerintah dengan berbagai kebijakan dan program yang dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat di daerahnya.

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah adalah lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah yang dibentuk oleh masing-masing daerah berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat daerah bertanggung jawab memenuhi akuntabilitas dan harapan masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan yang maksimal serta kinerja yang baik, sehingga perangkat daerah harus dapat mengambil keputusan yang tepat yang akan direalisasikan dalam bentuk program kerja.

Salah satu faktor yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang tepat adalah informasi akuntansi. Informasi akuntansi yang baik adalah informasi yang memuat peristiwa atau transaksi yang telah terjadi yang dijelaskan dalam bentuk laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Mardi (2011:13) mendefinisikan informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang lebih berguna dan lebih berarti bagi yang menerimanya. Dan, menurut Azhar Susanto (2017:38) informasi adalah hasil pengolahan data yang memberikan arti dan manfaat.

Romney dan Steinbart (2015:4) juga mendefinisikan informasi adalah data yang telah dikelola dan diproses untuk memberikan arti dan memperbaiki proses pengambilan keputusan.

Terkait kualitas informasi akuntansi di Indonesia ini, prosedur akuntansi menjadi sorotan Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo (12/2018) dalam sambutan pembukaan Kongres XIII Ikatan Akuntansi Indonesia mengatakan bahwa prinsip akuntansi itu cepat, murah, dan aman. Bukan berorientasi kepada prosedur yang berbelit-belit. Hal ini berkaitan dengan apa yang diamati oleh Presiden mengenai sejumlah prosedur yang lambat di pemerintahan, misalnya terkait pemberian bantuan untuk membangun kembali rumah korban gempa bumi di Lombok belum bisa diterima setelah pencairan selama 2,5 bulan karena harus melalui 17 prosedur untuk mencairkan dana tersebut. Selain itu juga, dalam sambutannya beliau mengatakan bahwa akuntansi memiliki peran penting dalam pembangunan nasional yang berkesinambungan, dan harapannya akuntabilitas tidak semata-mata menyajikan laporan keuangan yang wajar, tetapi akuntabilitas juga memiliki fungsi bagi para pemangku kepentingan untuk terhindar dari upaya penyelewengan atau penyimpangan dalam laporan keuangan.

Dalam instansi pemerintahan, informasi memiliki peranan penting dalam terbentuknya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) harus memenuhi kriteria karakteristik laporan keuangan pemerintah yang ada di dalam PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Indonesia yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Sesuai kriteria karakteristik laporan keu-

angan pemerintah, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu kriteria karakteristik laporan keuangan pemerintah adalah relevan yang menunjukkan bahwa informasi harus memiliki manfaat umpan balik, memberikan manfaat prediktif, tepat waktu, serta lengkap.

Namun pada realitanya, informasi tidak disampaikan secara relevan. Seperti yang disampaikan oleh oleh Anggota Fraksi Partai Demokrat dalam Rapat Paripurna DPR-RI tentang RUU P2 APBN TA 2020 (07/09/2021) bahwa pelaporan beberapa transaksi pajak belum lengkap menyajikan hak negara minimal Rp. 21,57 Triliun dan USD 8.26 Juta serta kewajiban negara minimal Rp. 165.9 triliun sesuai basis akuntansi akrual dan saldo pitang daluwarsa yang belum diketahui kewajarannya dengan nilainya Rp. 1,75 triliun dan saldo kas terlambat disetorkan ke kas negara sebesar Rp. 536,51 miliar. Kas tidak didukung dengan keberadaan fisik kas sebesar 81,46 miliar, pengelolaan kas tidak tertib sebesar Rp. 24,63 miliar pada 31 kementerian/lembaga.

Laporan keuangan pemerintah daerah memiliki kualitas yang tinggi apabila laporan keuangan yang disajikan setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini ini menunjukkan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas sesuai yang telah diatur dalam UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian

(WDP), Opini Tidak Wajar (TP) dan Pernyataan menolak memberikan opini atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Fenomena yang terjadi, Ketua BPK, Agung Firman Sampurna mengungkapkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2020 bahwa BPK telah memeriksa 541 dari 542 (99%) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2019. Secara keseluruhan, pada semester 1 tahun 2020, hasil pemeriksaan BPK mengungkapkan opini WTP atas 485 (90%) LKPD, opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 50 (9%) LKPD, dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 6 (1%) LKPD. Jumlah opini WTP mengalami peningkatan dibandingkan dengan LKPD tahun 2018 yaitu 82%. (<https://www.bpk.go.id>)

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya pada tahun 2011-2020 telah terjadi peningkatan opini audit. Dimana pada tahun 2011-2015 meraih opini Wajar Dalam Pengecualian (WDP), dan pada 2016-2020 mengalami peningkatan dan perubahan yang lebih baik dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 5 tahun berturut-turut. Hal tersebut menunjukkan bahwa entitas pemerinta daerah Kota Tasikmalaya telah menyajikan laporan keuangan yang wajar dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang berlaku.

Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga dapat dibantu dengan penerapan *good government* di instansi pemerintah. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*) dapat dibuktikan dengan adanya kesesuaian pengelolaan anggaran oleh

pemerintah daerah dengan laporan keuangan pemerintah daerah. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi, dengan diterapkannya beberapa prinsip *good governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas.

Seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani pada Webinar Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah tahun 2020 pada tanggal 22 September 2020 yaitu menghimbau kepada seluruh pemangku kepentingan termasuk Pemerintah Daerah untuk tetap menjaga kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan.

Untuk memperoleh informasi akuntansi yang berkualitas, diperlukan kompetensi staf akuntansi. Kompetensi staf akuntansi merupakan salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas nilai informasi yang baik sehingga dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan. (Nazrin:2017)

Seperti yang disampaikan oleh Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan bahwa kualitas laporan keuangan sangat terkait dengan kompetensi profesional dari pembuat laporan keuangan, rendahnya kualitas laporan keuangan juga sangat terkait dengan tidak adanya aturan yang mewajibkan pembuat laporan keuangan mempunyai kompetensi dalam bidang akuntansi. Di Indonesia belum ada standar atau peraturan yang mengatur kompetensi minimum dari pihak manajemen perusahaan yang bertanggungjawab atas akuntansi dan pelaporan keuangan.

Penelitian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Jajang Badruzaman (2014) menunjukkan bahwa penerapan *good government governance* berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi, artinya kualitas informasi akuntansi tidak terlepas dari penerapan *good government governance* itu baik maka kualitas informasi akan semakin baik. Penelitian yang dilakukan oleh Fera Pratiwi Zai, Sahala Purba, dan Arison Nainggolan (2020) menyatakan bahwa penerapan *good government governance* berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Jajang Badruzaman (2014) menunjukkan bahwa kompetensi staf akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi akuntansi yang artinya kualitas informasi akuntansi tidak terlepas dari kualifikasi staf akuntansi jika kualifikasinya baik maka akan mendukung terhadap pembuatan pelaporan. Penelitian yang dilakukan oleh Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti, Anantawikrama Tungga Atmadja, dan Nyoman Ari Surya Darmawan (2014), Dariana dan Jonase Oktavia (2018), dan Arizal Kamal Pasha (2018) juga menunjukkan bahwa kompetensi staf akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Iwan Hermansyah dan Rina Marlina (2019) dan Putra Mhd Nazrin (2017) melakukan penelitian dengan hasil yang menunjukkan bahwa Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh positif terhadap Kualitas Informasi Keuangan Daerah.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai pengaruh *good government governance* dan kompetensi staf akuntan

terhadap kualitas informasi akuntansi, adapun penelitian-penelitian lain yang mendukung penelitian ini sebagai berikut:

**Tabel 1. 1**

**Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu Dengan Penelitian Penulis**

No	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
1	Fera Pratiwi Zai, Sahala Purba, dan Arison Nainggolan 2020 Pengaruh Penerapan <i>Good Government Governance</i> dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada BPKAD Kabupaten Nias Barat.	• <i>Good Government Governance</i>	• Kompetensi Sumber Daya Manusia • Kualitas Informasi Laporan Keuangan	Penerapan <i>Good Government Governance</i> berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan, Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. Penerapan <i>Good Government Governance</i> Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh secara simultan Kualitas Informasi Laporan Keuangan.	Jurnal Mutiara Akuntansi Volume 5 No 1 Tahun 2020 Program Studi Akuntansi Universitas Sari Mutiara Indonesia ISSN 2579-7611
2	Wala Siti Nurlaela 2015 Pengaruh <i>Good Government Governance</i> dan Akuntabilitas terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas SKPD Kabupaten Ciamis	• <i>Good Government Governance</i>	• Akuntabilitas • Kinerja Instansi Pemerintah	Secara parsial <i>Good Government Governance</i> berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah, dan secara parsial Akuntabilitas berpengaruh terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Secara Simultan <i>Good Government Governance</i> dan Akuntabilitas berpengaruh bersama-sama terhadap Kinerja Instansi Pemerintah.	Jurnal Ilmu Pemerintahan 2015 Universitas Komputer Indonesia

3	<p>Febrina Lastiar Hutapea dan Aristanti Widyarningsih 2017</p> <p>Pengaruh <i>Good Government Governance</i> dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada Pemerintah Provinsi di Indonesia</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Good Government Governance</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ukuran Legislatif</li> <li>• Kinerja Pemerintah Daerah</li> </ul>	<p>Secara simultan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari <i>Good Government Governance</i> terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan proksi PDRB Per Kapita, secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan dari <i>Good Government Governance</i> terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan proksi tingkat kemiskinan, secara simultan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari <i>Good Government Governance</i> terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan proksi rasio kemandirian, secara simultan bahwa tidak terdapat dari Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan proksi Tingkat Kemiskinan, secara simultan tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan proksi PPDB Per Kapita, dan secara simultan terdapat pengaruh yang signifikan dari Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Pemerintah Daerah dengan proksi rasio kemandirian.</p>	<p>Jurnal Akuntansi Riset Volume 9 No 1 2017 Program Studi Akuntansi Universitas Pendidikan Indonesia ISSN 2086-2563</p>
---	--	---	--	---	--

4	<p>I Gede Iswara Yudhasena dan IG. A.M Asri Dwija Putri 2019</p> <p>Pengaruh <i>Good Government Governance</i>, Pengendalian Intern, dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Good Government Governance</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengendalian Intern</li> <li>• Budaya Organisasi</li> <li>• Kinerja Organisasi Perangkat Daerah</li> </ul>	<p><i>Good Government Governance</i> berpengaruh positif terhadap Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem, Pengendalian Intern di OPD berpengaruh positif terhadap Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem, Budaya Organisasi di OPD berpengaruh positif terhadap Efektivitas Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem</p>	<p>E-Jurnal Akuntansi Vol 28.1.Juli 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ISSN 2302-8556</p>
5	<p>Surono 2020</p> <p>Pengaruh <i>Good Government Governance</i> terhadap Kinerja Instansi Pemerintah pada 19 Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Good Government Governance</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinerja Instansi Pemerintah</li> </ul>	<p><i>Good Government Governance</i> pengaruh positif terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Cianjur</p>	<p>Bidang Akuntansi Vol 7 No 4 2020 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan</p>
6	<p>Fajar Meiyanti, Ichi, Trisandi Eka Putri 2019</p> <p>Pengaruh Faktor Risiko Kecurangan, <i>Good Government Governance</i>, dan <i>Organizational Citizenship Behavior</i> terhadap Kinerja Organisasi berdasarkan Pendekatan <i>Value For Money</i> pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Subang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Good Government Governance</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Organizational Citizenship Behavior</i></li> <li>• Kinerja Organisasi</li> <li>• <i>Value For Money</i></li> </ul>	<p>Faktor Risiko Kecurangan di Pemerintah Daerah berpengaruh 10egative tidak signifikan terhadap <i>Value For Money</i>, <i>Good Government Governance</i> di Pemerintah Daerah berpengaruh secara positif signifikan terhadap <i>Value For Money</i>, <i>Organizational Citizenship Behavior</i> di Pemerintah Daerah berpengaruh negative tidak signifikan terhadap <i>Value For Money</i>. Secara sim-</p>	<p>Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan Vol 1 no 2 Januari 2019 Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sutaatmadja ISSN 2622-2205</p>

7	<p>Jajang Badruzaman 2014 Pengaruh Dukungan Pimpinan dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Penerapan <i>Good Governance</i> serta dampaknya terhadap Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Daerah pada Kantor Kecamatan se Kota Tasikmalaya</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Good Government Governance</i></li> <li>• Kompetensi Staf Akuntansi</li> <li>• Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dukungan Pimpinan</li> </ul>	<p>ultan menunjukkan bahwa secara statistic terbukti Faktor Risiko Kecurangan, <i>Good Government Governance</i> dan. <i>Organizational Citizenship Behavior</i> secara bersama-sama berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Value For Money</i> di Pemerintah Daerah Dukungan Pimpinan, Kompetensi Staf Akuntansi pada Kantor Kecamatan Kota Tasikmalaya pada umumnya dan staf akuntansinya memiliki kompetensi yang baik, Informasi Keuangan Daerah di Lingkungan Kantor Kecamatan Kota Tasikmalaya memiliki kualitas yang baik. Dukungan Pimpinan, dan Kompetensi Staf Akuntansi secara total berpengaruh terhadap penerapan <i>Good Governance</i> akan tetapi secara parsial Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh negative terhadap Penerapan <i>Good Governance</i>. Dukungan pimpinan, Kompetensi Staf Akuntansi dan Penerapan <i>Good Governance</i> baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif terhadap Kualitas Informasi Akuntansi Keuangan Daerah.</p>	<p>Jurnal Akuntansi Volume 9 Nomor 1 Januari-Juni 2014 Universitas Siliwangi ISSN 1907-9958</p>
---	--	--	---	---	---

8	Handi Yanuar Lestiawan dan Bambang Jatmiko 2015 <i>Key Success Factor Good Government Governance</i> serta Pengaruhnya terhadap Kinerja Pemerintah pada Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Good Government Governance</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinerja Pemerintah Daerah</li> </ul>	Hasil penelitian Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat mempunyai pengaruh terhadap Kinerja Pemda namun tidak signifikan	MAKSIMUM (Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang) Vol 5 No. 1 2015 Universitas Muhammadiyah Semarang ISSN 2580-9482
9	Ni Luh Nyoman Ari Udiyanti, Anantawikrama Tungga Atmadja, dan Nyoman Ari Surya Darma 2014 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Kabupaten Buleleng	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi Staf Akuntansi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan</li> <li>• Pengendalian Internal</li> <li>• Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</li> </ul>	Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Kompetensi Staf Akuntansi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, dan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf secara simultan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan	Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Vol 2 No 1 2014 S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha
10	Iwan Hermansyah dan Rina Marlina 2019 Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi Dalam Pencapaian Kualitas Informasi Keuangan Daerah pada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi Staf Akuntansi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pencapaian Kualitas Informasi Keuangan Daerah</li> </ul>	Hasil penelitian Kompetensi Staf Akuntansi di Lingkungan Kantor Kecamatan Kota Tasikmalaya dapat dikatakan baik, Informasi Keuangan yang dihasilkan oleh Kantor Kecamatan	Jurnal Akuntansi Volume 14 Nomor 2 Juli-Desember 2019 Universitas Siliwangi ISSN 2385-9246

	Kantor Kecamatan Kota Tasikmalaya.			Kota Tasikmalaya sudah dapat dikatakan baik, Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh positif terhadap Kualitas Informasi Keuangan Daerah.	
11	Putra Mhd Nazrin 2017 Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Bukittinggi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi Staf Akuntansi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan</li> <li>• Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>• Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</li> </ul>	Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Bukittinggi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan di Kota Bukittinggi, dan Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan di Kota Bukittinggi.	Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Fekon Vol 4 No. 1 (Februari) 2017 Fakultas Ekonomi Universitas Riau
12	Dariana dan Jonase Oktavia 2018 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada Satuan Organisasi Perangkat Daerah Kab, Bengkulu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi Staf Akuntansi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Sistem Pengendalian Internal</li> <li>• Kualitas Laporan Keuangan</li> </ul>	Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan.	Jurnal Akuntansi Syariah (JAS) Volume 2 No 1 2018 STIE Syariah Bengkulu ISSN 2657-1676

13	<p>Arizal Kamal Pasha 2018</p> <p>Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada SKPD Kabupaten Grobogan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi Staf Akuntansi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan</li> <li>• Pengelolaan Keuangan Daerah</li> <li>• Sistem Pengendalian Intern</li> <li>• Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</li> </ul>	<p>Hasil penelitian Penerapan Standar Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dan Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.</p>	<p>E-Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta 2018</p>
14	<p>Emay, Catur Martian Fajar, dan Adi Suparwo 2019</p> <p>Dampak Audit Internal, Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada PT Dirgantara Indonesia (Persero)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi Staf Akuntansi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Audit Internal</li> <li>• Pengendalian Internal</li> <li>• Kualitas Laporan Keuangan</li> </ul>	<p>Hasil penelitian Audit Internal tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan, Kompetensi Staf Akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Secara simultan Audit Internal, Pengendalian Internal, dan Kompetensi Staf Akuntansi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.</p>	<p>Jurnal Ecodemica Vol 3 NO. 1 April 2019 Universitas BSI ISSN 2549-8932</p>
15	<p>Fibria Angraini Puji Les-tasi 2020</p> <p>Pengaruh Sistem Akuntansi, Kompetensi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetensi Staf Akuntansi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Akuntansi</li> <li>• Internal Control</li> <li>• Kualitas Laporan</li> </ul>	<p>Sistem Akuntansi, Kompetensi Staf Akuntansi dan <i>Internal Control</i> berpengaruh positif terhadap Kualitas</p>	<p>Sosio e-kons Volume 12 No. 1 April 2020 Universitas Indraprasta PGRI ISSN 2085-2266</p>

	Staf Akuntansi,  dan <i>Internal Control</i> terhadap Kualitas Laporan Keuangan Perusahaan		Keuangan Perusahaan	Laporan Keuangan Perusahaan	
16	Mardia Rahmi 2013 Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi dan Keahlian Pemakai terhadap Kualitas Informasi Akuntansi pada Perusahaan BUMN di Kota Padang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas Informasi Akuntansi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penggunaan Teknologi Informasi</li> <li>• Keahlian Pemakai</li> </ul>	Penggunaan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Informasi Akuntansi, dan Keahlian Pemakai Berpengaruh signifikan positif terhadap Kualitas Informasi Akuntansi	Jurnal Akuntansi Vol 1 No 2 2013 Universitas Negeri Padang
17	Ratih Purnamasari 2015 Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Informasi Akuntansi dan Implikasinya pada Kepuasan Pengguna Akhir pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas Informasi Akuntansi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kualitas Sistem Informasi Akuntansi</li> <li>• Kepuasan Pengguna Akhir</li> </ul>	Hasil penelitian Kualitas Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Akuntansi, Kualitas Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kepuasan Pengguna Akhir, Kualitas Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kepuasan Pengguna Akhir, dan Kualitas Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh terhadap Kepuasan Pengguna Akhir pada PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten.	Jurnal Universitas Komputer Indonesia 2015 Fakultas Ekobomi Universitas Komputer Indonesia

18	Niva Evania 2016 Pengaruh Keahlian Pem- pakai dan Inten- sitas Pemakain terhadap Kualita- s Informasi Akuntansi pada Satuan Kerja Perangkat Dae- rah Kabupaten Indagiri Hulu.	• Kualitas Informasi Akuntansi	• Keahlian Pemakai • Intensitas Pemakaian	Penggunaan Teknologi Informasi berpengaruh ter- hadap Kualitas In- formasi Akuntansi, Keahlian Pemakai berpengaruh ter- hadap Kualitas In- formasi Akuntansi, Intensitas Pemakaian tidak berpengaruh ter- hadap Kualitas In- formasi Akuntansi.	JOM Fekon Vol 3 No 1 (Feb- ruari) 2016 Fakultas Ekonomi Uni- versitas Riau
19	Cornelia Ferny Jansen, Jenny Morasa, dan Anneke Wangkar 2018 Pengaruh Penggunaan Teknologi In- formasi dan Keahlian Pemakai ter- hadap Kualitas Informasi	• Kualitas Informasi Akuntansi	• Penggunaa n Teknolo- gi Informasi • Keahlian Pemakai	Penggunaan Teknologi Informasi berpengaruh signif- ikan terhadap Kualita- s Informasi Akuntansi, dan Keahlian Pemakai berpengaruh signif- ikan terhadap Kualita- s Informasi Akuntansi.	Jurnal Riset Akuntansi Vol 13 No 03 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universi- tas Sam Ratulan- gi
20	Jufri Darma dan Gaffar Hafiz Sagala 2020 Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Akuntansi ter- hadap Kualitas	• Kualitas Informasi Akuntansi	• Kualitas Sistem In- formasi AKuntansi	Sistem Informasi Akuntansi ber- pengaruh terhadap Kualitas Informasi Akuntansi	Jurnal Ilmiah MEA Vol 4 No 1 2020 Universitas Negeri Medan ISSN 2621-5306

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai : Pengaruh Implementasi *Good Government Governance* dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Informasi Akuntansi (Sensus pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Tasikmalaya).

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan beberapa pertanyaan yang merupakan gambaran ruang lingkup penelitian yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi *Good Government Governance*, Kompetensi Staf Akuntansi, dan Kualitas Informasi Akuntansi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Tasikmalaya.
2. Bagaimana Hubungan Implementasi *Good Government Governance* dengan Kompetensi Staf Akuntansi.
3. Bagaimana pengaruh Implementasi *Good Government Governance* dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Informasi Akuntansi secara parsial pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Tasikmalaya.
4. Bagaimana pengaruh Implementasi *Good Government Governance* dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Informasi Akuntansi secara simultan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Tasikmalaya.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Implementasi *Good Government Governance*, Kompetensi Staf Akuntansi dan Kualitas Informasi Akuntansi pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Tasikmalaya.
2. Untuk mengetahui hubungan Implementasi *Good Government Governance* dengan Kompetensi Staf Akuntansi.
3. Untuk mengetahui pengaruh Implementasi *Good Government Governance* dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Informasi Akuntansi secara parsial pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Tasikmalaya.
4. Untuk mengetahui pengaruh Implementasi *Good Government Governance* dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Informasi Akuntansi secara simultan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Tasikmalaya.

### **1.4 Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik, khususnya untuk membahas implementasi *good government governance*, kompetensi staf akuntansi dan kualitas informasi akuntansi.

## 2. Terapan Ilmu Pengetahuan

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan menambah ilmu pengetahuan penulis serta mengetahui penerapan ilmu akuntansi di bidang sektor publik.
- b. Bagi Lembaga khususnya Fakultas Ekonomi, diharapkan menjadi tambahan bahan bacaan, referensi, bahan masukan dan perbandingan di perpustakaan yang dapat dijadikan bahan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
- c. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan yang tepat.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

#### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan pada 36 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya.

#### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Untuk memperoleh dan mengolah data/informasi yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, penulis akan melaksanakan penelitian dengan pendekatan sensus pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Tasikmalaya Jawa Barat selama 8 bulan yaitu dari Bulan September 2021 sampai dengan April 2022 yang terlampir pada Lampiran 1.